



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 11 (Sebelas)
Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
Hari, Tanggal	: Jumat, 7 Juni 2024
Pukul	: 14.30 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Martin Manurung, S.E., M.A./ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
A c a r a	: Pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan RKP dan RKAKL Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2025;2. Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2023 dan realisasi anggaran semester I Tahun 2024;3. Rencana usulan PMN Tahun 2025; dan4. Lain-lain.
Hadir	: 1. 19 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Sdr. Erick Thohir; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI beserta jajarannya pada Pukul 14.55 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Jumat, 7 Juni 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Martin Manurung, S.E., M.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian BUMN tahun 2023 yang mencapai 98,57% serta mendorong Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, yang telah ditetapkan sebesar Rp.277.498.437.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas;
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.197.404.884.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - b. Program Pengembangan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp.80.093.553.000,- (*Delapan Puluh Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN RI Tahun 2025 Sebesar Rp.66.644.541.000,- (*Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir pada Pagu Indikatif Tahun 2025.
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 sebesar Rp.44.249.0000.000.000,- (*Empat Puluh Empat Triliun Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp.13.868.000.000.000,- (*Tiga Belas Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah*) dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3.
 - b. PT ASABRI (Persero) sebesar Rp.3.610.000.000.000,- (*Tiga Triliun Enam Ratus Sepuluh Miliar Rupiah*) dalam rangka perbaikan permodalan.

- c. PT PLN (Persero) sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) dalam rangka Program Listrik Desa.
- d. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) dalam rangka Penguatan Permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- e. PT Pelni (Persero) sebesar Rp.2.500.000.000.000,- (*Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) dalam rangka pengadaan kapal baru.
- f. PT Biofarma (Persero) sebesar Rp.2.212.000.000.000,- (*Dua Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Rupiah*) dalam rangka *capital expenditure (capex)* fasilitas baru.
- g. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp.2.096.000.000.000,- (*Dua Triliun Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah*) dalam rangka Pembangunan Tol Jogja – Bawen dan Tol Solo – Jogja.
- h. PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
- i. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
- j. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dalam rangka pengembangan usaha.
- k. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp.1.800.000.000.000,- (*Satu Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah*) dalam rangka pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
- l. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID Food sebesar Rp. 1.624.000.000.000,- (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Empat Miliar Rupiah*) dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
- m. PT PP (Persero) Tbk. Rp.1.563.000.000.000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Rupiah*) dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
- n. Perum Damri sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka penyediaan bus listrik.
- o. Perumnas sebesar Rp.1.000.000.000.000 (*Satu Triliun Rupiah*) dalam rangka penyelesaian penyediaan perumahan.
- p. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp.976.000.000.000 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar*) dalam rangka Pembuatan Kereta Rel Listrik (KRL).

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 dengan masing-masing BUMN calon penerima Penyertaan Modal Negara (PMN).

5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 16.30 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352**